

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Provinsi Jambi melaksanakan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan dan memfasilitasi pelaksanaan hubungan kerja antar daerah dalam berbagai sektor pembangunan daerah.

Adapun kebijakan kerjasama antar daerah di Provinsi Jambi dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan umum pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun rencana lainnya.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2012, merupakan lanjutan kerjasama yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya baik berupa kerjasama regional maupun kerjasama antar provinsi untuk sektor tertentu. Kerjasama – kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Forum Gubernur se-Wilayah Sumatera yang pada tahun 2012 dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Adapun kesepakatan-kesepakatan yang dicapai adalah :

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah se-Sumatera melalui kerjasama untuk kepentingan bersama dengan melakukan kegiatan yang melibatkan provinsi se-wilayah Sumatera, yang memerlukan dukungan dan penguatan dari Pemerintah.
- b. Pewujudan keseimbangan pembangunan melalui percepatan peningkatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi wilayah Sumatera
- c. Peningkatan kerjasama antar provinsi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing dan nilai tambah produksi sektor unggulan

Selain kesepakatan – kesepakatan di atas, forum ini juga membuat dua kesepakatan bersama para gubernur se-wilayah Sumatera. Kesepakatan pertama adalah tentang kerjasama penanganan perempuan dan anak korban kekerasan khususnya kekerasan dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) dengan jangka waktu kerjasama adalah selama lima tahun. Sedangkan kesepakatan kedua adalah tentang program studi unggulan provinsi (*center of excellence*) pada perguruan tinggi negeri se-Sumatera. Dalam kerjasama ini Provinsi Jambi menetapkan program studi nutrisi dan makanan ternak pada fakultas peternakan Universitas Jambi sebagai program studi unggulan di Provinsi Jambi. Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh seluruh rektor dari perguruan tinggi negeri se-Wilayah Sumatera yang disepakati mejadi center of excellence dalam hal pembahasan

mekanisme penerimaan mahasiswa, pembiayaan, penentuan persentase kuota, mekanisme peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan program studi serta hal – hal lain yang bersifat teknis dan administrasi.

2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau dalam hal pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata. Tahun 2012 merupakan tahun pertama pelaksanaan kerjasama sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama pada tahun 2011 lalu. Hal – hal yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan perjanjian kerjasama pada tahun 2012 adalah pemantapan objek-objek kerjasama terkait pengawasan, pengendalian dan pengamanan; penelitian dan pengembangan; pemanfaatan dan pelestarian; serta pengembangan kerjasama ekonomi regional dan/atau internasional. Pada tahun 2012 juga dilaksanakan beberapa kali pertemuan antar empat provinsi yang diantaranya membicarakan tentang persiapan rencana *Visit and Sail to Karimata 2015*.

3. Kerjasama Daerah di bidang Ketransmigrasian antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Banten. Tujuan dilaksanakan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang berada di dalam kawasan transmigrasi.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antar daerah untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan tidak ada Badan khusus yang memonitoring sekaligus mengevaluasi implementasi hasil kesepakatan Forum Gubernur se-Wilayah Sumatera oleh masing-masing Provinsi yang berimplikasi pada minimnya komitmen masing-masing provinsi dalam pelaksanaannya.

Solusinya adalah pelaksanaan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu sebelum dilaksanakan Forum Tahunan untuk memonitoring dan mengevaluasi progress pelaksanaan kesepakatan.

2. Dukungan APBD Provinsi Jambi terhadap pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan belum memadai. Solusinya adalah melibatkan Kabupaten yang berada pada kawasan pesisir, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur untuk ikut berperan aktif dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata.

3. Dalam kerjasama daerah bidang ketransmigrasian tidak ditemukan kendala karena kerjasama ini merupakan lanjutan kerjasama pada tahun sebelumnya.

6.2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan kerjasama daerah antara Provinsi Jambi dengan pihak ketiga dilaksanakan untuk meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal Provinsi Jambi.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebagian besar adalah implementasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat para pihak pada tahun sebelumnya, yaitu kerjasama penelitian, penyelidikan dan pengembangan di Bidang Kegeologian; Kerjasama pengembangan lahan pangan berkelanjutan; kerjasama bidang pendidikan; dan kerjasama yang baru ditandatangani nota kesepahamannya ada tahun 2012 adalah kerjasama persiapan dan pelaksanaan program *Compact* proyek *Green Prosperity*.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut;

1. Kerjasama tentang penelitian, penyelidikan dan pengembangan di Bidang Kegeologian antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari kerjasama ini, pada tahun 2012 tim assesor dari UNESCO telah mengunjungi kawasan yang diusulkan untuk menjadi GEOPARK di Kabupaten Merangin.
2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI tentang pengembangan lahan pangan berkelanjutan pada Daerah Irigasi Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Tujuan kerjasama adalah menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada daerah irigasi Batang Asai seluas 6.210 Ha sebagai salah satu sumber utama produksi beras nasional untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan

sosialisasi dan pembicaraan awal kepada masyarakat yang lahannya masuk ke dalam rencana daerah irigasi Batang Asai.

3. Di bidang pendidikan dan peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM), Pada tahun 2012 telah kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Universitas Indonesia, antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Sekolah Manajemen Transpor Trisakti telah diimplementasikan. Untuk tindak lanjut kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan BAPPENAS, pada tahun 2012 SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Jambi telah diikutsertakan dalam beberapa Diklat yang dilaksanakan oleh BAPPENAS. Sementara untuk kerjasama dengan Universitas Indonesia, pada tahun 2012 telah difasilitasi calon – calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan kuliah di universitas tersebut. Adapun kerjasama dengan Sekolah Manajemen Transpor Trisakti, pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Jambi telah melibatkan institusi ini dalam penyusunan master plan kawasan Ujung Jabung.
4. Kerjasama persiapan dan pelaksanaan program *Compact Proyek Green Prosperity* telah ditandatangani nota kesepahamannya pada tanggal delapan November tahun 2012 antara Lembaga Wali amanat *Millenium Challenge Account* – Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi serta antara Lembaga Wali amanat *Millenium Challenge Account* – Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin. Proyek green prosperity ini adalah

salah satu kegiatan dalam program compact yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, dan meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan cara memperbaiki kegiatan pemanfaatan lahan serta pengelolaan sumber daya alam.

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ditemukan permasalahan dalam kerjasama ini, bahkan untuk kerjasama tentang penelitian, penyelidikan dan pengembangan di Bidang Kegeologian, masyarakat yang berada dalam kawasan rencana Geopark sangat mendukung. Hal ini terlihat dalam sambutan masyarakat kepada tim assesor dari UNESCO.

6.3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain dialokasikan dana dekonsentrasi (DK) dan dana tugas pembantuan (TP) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dialokasikan dana untuk instansi vertikal berupa dana kantor pusat (KP) dan dana kantor daerah (KD).

Melihat jumlah, luasnya cakupan penanganan dan besaran alokasi anggaran instansi vertikal di Provinsi Jambi yang lebih besar dari alokasi anggaran APBD Provinsi memperlihatkan kepada kita gambaran tentang besar dan banyaknya urusan yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat di daerah, namun disisi lain apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah masih terkendala dari sisi pendanaan serta kemampuan dan

ketersediaan aparaturnya. Untuk itu kepada Instansi Vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat di Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan **diwajibkan** berkoordinasi dengan Gubernur atau Bupati/Walikota dan instansi terkait dalam perencanaan, pendanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah pusat yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya dan diwajibkan juga memberikan saran kepada Gubernur atau Bupati/Walikota berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada masing-masing instansi vertikal.

Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka koordinasi dengan instansi vertikal pada tahun 2012 sebagai berikut :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi

Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Provinsi Jambi pada Tahun 2012 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam bagian anggaran 54 DIPA Tahun 2012 BPS Provinsi Jambi, dengan nilai sebesar Rp11.199.700.000,00 dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS adalah sebesar Rp.4.498.532.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 4.409.011.213,00 atau sebesar 98,01%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS adalah sebesar Rp.2.024.400.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp.1.850.301.600,00 atau sebesar 91,40%.

c. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik adalah sebesar Rp.4.676.768.000,00 dan pencapaian realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 4.556.107.385,00 atau sebesar 97,42%.

2. Kepolisian Negara RI Daerah Jambi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya POLRI dengan anggaran Rp.253.644.425.000,00 realisasi capaian Rp.282.561.064.154,00 atau 100 %.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur POLRI dengan anggaran Rp.33.846.642.000,00, realisasi capaian Rp.33.770.552.327,00 atau 99,78 %.

c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur POLRI dengan anggaran Rp6.252.011.000,00 realisasi capaian Rp6.206.957.906,00 atau 99,28 %.

- d. Program Pendidikan dan Latihan Aparatur POLRI dengan anggaran Rp.7.544.749.000,00 realisasi capaian Rp.7.568.125.863,00 atau 100%.
- e. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia POLRI dengan anggaran Rp6.082.173.000,00 realisasi capaian Rp6.105.333.584,00 atau 100 %.
- f. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban dengan anggaran Rp7.412.722.000,00 realisasi capaian Rp7.266.295.015,00 atau 98,02 %.
- g. Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban dengan anggaran Rp49.150.000,00 realisasi capaian Rp27.577.500,00 atau 56,11 %.
- h. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan dengan anggaran Rp7.534.965.000,00 realisasi capaian Rp7.512.494.144,00 atau 99,70%.
- i. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan anggaran Rp53.563.690.000,00 realisasi capaian Rp55.323.345.546,00 atau 100%.
- j. Program Lidik Sidik Tindak Pidana dengan anggaran Rp20.165.994.000,00 realisasi capaian Rp23.881.339.493,00 atau 100%.
- k. Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi dengan anggaran Rp33.247.165.000,00 realisasi capaian Rp35.955.708.743,00 atau 100%.
- l. Program Pengembangan Hukum Kepolisian dengan anggaran Rp361.410.000,00 realisasi capaian Rp360.727.000,00 atau 99,81%.

3. Balai Pengelolaan DAS Batanghari (BP DAS Batanghari)

Pada tahun anggaran 2012, BP DAS Batanghari melalui anggaran Departemen Kehutanan melaksanakan Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan – Reboisasi pada DAS Prioritas dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan Tanaman RHKL dan hutan Kota

Penyelenggaraan kegiatan Pemeliharaan tanaman RHKL dan hutan kota dengan dana sebesar Rp. 2.564.080.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 2.347.470.000,00 atau sekitar 95,06 % dengan hasil yang dicapai yaitu terpeliharanya tanaman reboisasi kawasan konservasi dan hutan kota seluas 3.075 ha

- 2) Honor Penyuluh Lapangan (PL) – RHL dan KBR pada wilayah kerja BPDAS Batanghari (14 kabupaten/Kota) Provinsi Jambi dan Sumatera Barat

Penyelenggaraan kegiatan Honor Penyuluh Lapangan (PL) – RHL dan KBR pada wilayah kerja BPDAS Batanghari (14 kabupaten/Kota) Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dengan dana sebesar Rp. 578.400.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 201.000.000,00 atau sekitar 34,75 % dengan hasil yang dicapai yaitu Realisasi pembayaran Honor Penyuluh Lapangan RHL dan KBR pada 14 Kabupaten/Kota

3) Rancangan Rehabilitasi Hutan/Restorasi Tahun 2012

Penyelenggaraan kegiatan Rancangan Rehabilitasi Hutan/Restorasi Tahun 2012 dengan dana sebesar Rp. 791.695.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 759.163.500,00 atau sekitar 95,89 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Rancangan Rehabilitasi/Restorasi Hutan Tahun 2012 seluas 8.050 ha pad 6 satker UPT PHKA

4) Kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan (kesekretariatan, kelembagaan, monev, bintek, pelaporan)

Penyelenggaraan kegiatan Pendukung Rehabilitasi Hutan (kesekretariatan, kelembagaan, monev, bintek, pelaporan) dengan dana sebesar Rp.1.213.820.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 1.095.795.700,00 atau sekitar 90,28 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Laporan Kegiatan Rehabilitasi/Restorasi Hutan tahun 2012 seluas 8.050 ha pada 6 satker UPT PHKA

b. Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Lahan Kritis pada DAS Prioritas dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Penanaman bibit KBR Tahun 2011

Penyelenggaraan kegiatan Penanaman bibit KBR Tahun 2011 dengan dana sebesar Rp. 7.312.500.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.4.395.786.390,00 atau sekitar 60,11 % dengan hasil yang dicapai yaitu tertanamnya bibit hasil KBR tahun 2011 sebanyak 195 unit di 13 Kab/Kota

2) Rencana Penanaman Kebun Bibit Rakyat 2011

Penyelenggaraan kegiatan Rencana Penanaman Kebun Bibit Rakyat 2011 dengan dana sebesar Rp. 327.825.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.286.913.500,00 atau sekitar 87,52 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Dokumen rencana penanaman KBR 2011/2012 pada 406 desa/unit

3) Kegiatan Pendukung Penanaman KBR (Sekretariatan, kelembagaan, monev, bimtek pelaporan)

Penyelenggaraan kegiatan Pendukung Penanaman KBR (Sekretariatan, kelembagaan, monev, bimtek pelaporan) dengan dana sebesar Rp.3.516.570.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.2.835.933.210,00 atau sekitar 80,64 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Laporan Kegiatan pembangunan KBR tahun 2012 dan penanaman KBR

4) Pengadaan Bibit Penghijauan Lingkungan

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Bibit Penghijauan Lingkungan dengan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.98.350.000,00 atau sekitar 98,35 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersedianya bibit penghijauan lingkungan untuk masyarakat

5) Produksi Persemaian Permanen

Penyelenggaraan kegiatan Produksi Persemaian Permanen dengan dana sebesar Rp. 829.500.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.707.077.657,00 atau sekitar 85,24 % dengan hasil yang dicapai yaitu tersedianya bibit tanaman kehutanan dan MPTS sebanyak 600.000 batang untuk masyarakat.

6) Pendukung untuk kegiatan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi

Penyelenggaraan kegiatan Pendukung untuk kegiatan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi dengan dana sebesar Rp.250.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.204.257.800,00 atau sekitar 81,70 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Laporan Kegiatan pengembangan perhutanan Berbasis Konservasi tahun 2012

c. Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan Mangrove, Gambut dan Rawa dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pemeliharaan mangrove, rawa dan gambut

Penyelenggaraan kegiatan Pemeliharaan mangrove, rawa dan gambut dengan dana sebesar Rp. 1.954.240.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.1.748.970.000,00 atau sekitar 89,49 % dengan hasil yang dicapai yaitu terpeliharanya tanaman reboisasi kawasan pantai, rawa dan gambut

2) Rehabilitasi mangrove, Rawa dan Gambut jenis Jelutung 140 ha

Penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi mangrove, Rawa dan Gambut jenis Jelutung 140 ha dengan dana sebesar Rp. 623.257.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.477.876.000,00 atau sekitar 76,67 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Rancangan dan terselenggaranya kegiatan Rehabilitasi dan Reboisasi

d. Dokumen Rencana Pengelolaan, Rencana Tahunan dan Rencana RHL Desa di DAS dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Sistem SOP Pengendalian Banjir dan Tanah Longsor

Penyelenggaraan kegiatan Pelaksanaan Sistem SOP Pengendalian Banjir dan Tanah Longsor dengan dana sebesar Rp.143.220.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.140.754.300,00 atau sekitar 98,28 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Laporan SOP Pengendalian Banjir dan Tanah Longsor

e. Laporan Hasil Kegiatan Tim Koordinasi RHL Wilayah Provinsi dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Terfasilitasinya fungsi Tim Koordinasi RHL

Penyelenggaraan kegiatan Terfasilitasinya fungsi Koordinasi RHL dengan dana sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.46.750.000,00 atau sekitar 93,5 % dengan hasil yang dicapai yaitu Terselenggaranya rapat Koordinasi RHL Wilayah Kerja BPDAS Batanghari 14 kab/kota

f. Data Potensi Hasil RHL di BPDAS dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Tersedianya data potensi RHL

Penyelenggaraan kegiatan tersedianya data Potensi RHL dengan dana sebesar Rp.98.040.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.93.935.000,00 atau sekitar 95,81 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Laporan hasil inventarisasi potensi hasil RHL

2) Pemantauan DAK

Penyelenggaraan kegiatan pemantauan DAK dengan dana sebesar Rp.63.860.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.52.050.000,00 atau sekitar 75,87 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Laporan hasil monitoring DAK

g. Laporan Hasil Kegiatan Gerakan Penanaman Massal dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Penyelenggaraan even kegiatan gerakan penghijauan

Penyelenggaraan kegiatan Penyelenggaraan even kegiatan gerakan penghijauan dengan dana sebesar Rp.371.780.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.273.179.500,00 atau sekitar 73,48 % dengan hasil yang dicapai yaitu Terselenggaranya even gerakan penghijauan lingkungan pada 14 kab/kota dan provinsi

h. Pembangunan Konservasi Tanah pada DAS Prioritas dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Konservasi Tanah pada DAS Prioritas

Penyelenggaraan kegiatan Konservasi tanah pada DAS Prioritas dengan dana sebesar Rp.256.220.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.200.500.000,00 atau sekitar 78,25 % dengan hasil yang dicapai yaitu Terbangunnya stasiun Hidrologi di Sub DAS Batanghari hulu, Teridentifikasinya karakteristik DAS

2) Bangunan Konservasi Tanah

Penyelenggaraan kegiatan Bangunan Konservasi Tanah dengan dana sebesar Rp.487.420.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.128.960.000,00 atau sekitar 26,46 % dengan hasil yang dicapai yaitu Terbangunnya sumur resapan 48 unit, embung 10 unit dan DAM Penahan 4 unit

i. Reklamasi Hutan oleh Perusahaan di Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Terfasilitasinya Reklamasi Hutan di areal pinjam pakai kawasan

Penyelenggaraan kegiatan terfasilitasinya Reklamasi Hutan di Areal Pinjam Pakai Kawasan dengan dana sebesar Rp.65.560.000,00 dengan realisasi mencapai

Rp.65.176.000,00 atau sekitar 99,41 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Laporan Reklamasi Hutan pada areal pinjam pakai

j. Dokumen Perencanaan dan Anggaran dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis Program

Penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja/teknis program dengan dana sebesar Rp.463.500.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.356.888.000,00 atau sekitar 76,99 % dengan hasil yang dicapai yaitu tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran, pembinaan administrasi kepegawaian dan penyebarluasan informasi pengelolaan DAS

k. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja BPDAS dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Dokumen Monitoring dan evaluasi kinerja DAS

Penyelenggaraan kegiatan dokumen Monitoring dan evaluasi kinerja DAS dengan dana sebesar Rp.958.205.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.878.186.400,00 atau sekitar 92,03 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Laporan kinerja DAS Batanghari

l. Luas Penetapan Areal Kerja Pengelolaan Hukum dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Fasilitasi Penetapan areal kerja Hukum

Penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Penetapan areal kerja Hukum dengan dana sebesar

Rp.1.263.750.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.103.718.000,00 atau sekitar 8,21 % dengan hasil yang dicapai yaitu Terfasilitasinya penetapan areal kerja hutan Kemasyarakatan

m. Areal Kerja Hutan Desa dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Fasilitas Penetapan Hutan Desa

Penyelenggaraan kegiatan Fasilitas Penetapan Hutan Desa dengan dana sebesar Rp.2.085.805,00 dengan realisasi mencapai Rp.570.590.300,00 atau sekitar 27,36 % dengan hasil yang dicapai yaitu Terfasilitasinya penetapan areal kerja hutan desa seluas 20.000 ha

n. Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Terpadu pada DAS Prioritas dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu

Penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu dengan dana sebesar Rp.642.490.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.542.147.300,00 atau sekitar 84,38 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya RPDAS Terpadu Air Hitam dan tersusunnya Raperda RPDAST Provinsi Jambi

o. Penyelenggaraan Forum DAS dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Terbentuk dan berfungsinya Forum DAS

Penyelenggaraan kegiatan terbentuk dan berfungsinya forum DAS dengan dana sebesar Rp.195.200.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.126.982.400,00 atau

sekitar 65,05 % dengan hasil yang dicapai yaitu Terlaksananya kegiatan forum DAS

p. Data Kinerja DAS Prioritas dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Tersedianya Data Kinerja DAS Prioritas

Penyelenggaraan kegiatan tersedianya data kinerja DAS Prioritas dengan dana sebesar Rp.99.850.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.99.600.000,00 atau sekitar 99,75 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya laporan hasil monitoring areal RHL 2003-2009

2) Karakterisasi DAS Mendahara

Penyelenggaraan kegiatan karakterisasi DAS Mendahara dengan dana sebesar Rp.400.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.346.368.700,00 atau sekitar 86,59 % dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya Karakteristik DAS Mendahara

q. Lokasi Model DAS Mikro dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Terbangunnya Model DAS Mikro

Penyelenggaraan kegiatan terbangunnya model DAS Mikro dengan dana sebesar Rp.250.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.232.250.000,00 atau sekitar 92,9 % dengan hasil yang dicapai yaitu Terbangunnya model DAS Mikro di Kab. Bungo

r. Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan- Reboisasi Pengkayaan pada DAS Prioritas dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Reboisasi Pengkayaan

Penyelenggaraan kegiatan Reboisasi Pengkayaan dengan dana sebesar Rp.18.737.335.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.18.498.801.410,00 atau sekitar 98,73 % dengan hasil yang dicapai Terbangunnya areal tanaman rehabilitasi hutan konservasi/lindung seluas 7.700 ha

2) Asistensi kegiatan RHL

Penyelenggaraan kegiatan Asistensi kegiatan RHL dengan dana sebesar Rp.228.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.221.321.800,00 atau sekitar 97,07 % dengan hasil yang dicapai Wilayah Kerja BPDAS Batanghari 14 kab/kota

s. Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan Kota pada DAS Prioritas dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pembuatan Hutan Kota

Penyelenggaraan kegiatan Pembuatan Hutan Kota dengan dana sebesar Rp.218.225.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.199.167.500,00 atau sekitar 91,27 % dengan hasil yang dicapai yaitu Terselenggaranya pembangunan hutan kota seluas 30 ha

t. Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan unit Kebun Bibit Rakyat pada DAS dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pembuatan KBR Tahun 2012

Penyelenggaraan kegiatan Pembuatan KBR tahun 2012 dengan dana sebesar Rp.10.550.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.10.548.890.000,00 atau sekitar

99,99 % dengan hasil yang dicapai yaitu Terbangunnya kebun Bibit Rakyat 211 unit pada 13 kab/kota

4. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi

Alokasi anggaran untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi tahun 2012 sebesar Rp 3.715.090.000,00 yang dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional lainnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi membuat kebijakan dan menetapkan beberapa program serta kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ada, program dan kegiatan meliputi :

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

a. Wahana Diseminasi informasi P4GN yang di publikasikan

Penyelenggaraan kegiatan diseminasi informasi P4GN dengan dana sebesar Rp.472.440.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar RP.413.007.048,00 atau 87.42%.

b. Organisasi Pemerintah yang di advokasi bidang P4GN

Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Pemerintah yang di advokasi bidang P4GN dengan dana sebesar Rp. 61.150.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 57.334.240,00 atau 93,98%.

c. Organisasi Swasta yang di advokasi bidang P4GN

Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Swasta yang di advokasi bidang P4GN dengan dana sebesar

Rp.61.150.000,00 pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.57.334.424,00 atau 93,76%.

d. Kader Penyuluh anti narkoba yang terbentuk

Penyelenggaraan kegiatan Kader Penyuluh anti narkoba yang terbentuk dengan dana sebesar Rp.131.850.000,00, realisasi sebesar Rp.130.175.505,00 atau 98,73%.

e. Lembaga Pendidikan yang diberdayakan bidang P4GN

Penyelenggaraan kegiatan Lembaga Pendidikan yang diberdayakan bidang P4GN dengan dana sebesar Rp. 288.750.000,00, realisasi untuk kegiatan ini sebesar Rp.243.907.125,00 atau 84.47%.

f. Lingkungan Kerja yang diberdayakan di bidang P4GN

Penyelenggaraan kegiatan Lingkungan Kerja yang diberdayakan di bidang P4GN dengan dana sebesar Rp. 270.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 211.969.260,00 atau 78,42%.

g. Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah perkotaan yang diberdayakan alternatif

Penyelenggaraan kegiatan Lokasi (lingkungan di daerah perkotaan yang diberdayakan alternative dengan dana sebesar Rp.137.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 118.082.310,00 atau 85,66 %.

h. Penyalahguna/Pecandu narkoba yang mengikuti Wajib Lapor

Penyelenggaraan kegiatan Penyalahguna/Pecandu narkoba yang mengikuti Wajib Lapor dengan dana sebesar Rp. 112.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.032.742,00 atau 26,58 %

- i. Penyalahguna/Pecandu Narkoba yang dijangkau layanan

Penyelenggaraan kegiatan Penyalahguna/Pecandu Narkoba yang dijangkau layanan dengan dana sebesar Rp. 94.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 69.001.240,00 atau 72,94 %

- j. Produk (informasi) intelijen yang dihasilkan

Penyelenggaraan kegiatan Produk (informasi) intelijen yang dihasilkan dengan dana sebesar Rp. 539.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 497.101.820,00 atau 92,09 %

- k. Dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang disusun

Penyelenggaraan kegiatan Dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan yang disusun dengan dana sebesar Rp.211.435.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 76.624.044,00 atau 36,24 %

- l. Layanan dukungan manajemen operasional perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Layanan dukungan manajemen operasional perkantoran dengan dana sebesar Rp. 814.325.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 608.952.235,00 atau 74,78 %

- m. Kendaraan bermotor

Penyelenggaraan kegiatan Kendaraan bermotor dengan dana sebesar Rp. 331.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 306.854.580,00 atau 92,44 %

n. Peralatan dan fasilitas perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Peralatan dan fasilitas perkantoran dengan dana sebesar Rp. 186.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.185.045.300,00 atau 99,22 %

5. LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO JAMBI

Program dan Kegiatan yang dilakukan pada Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Jambi dibiayai oleh dana APBN dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan SDPPI

a. Dokumen/Laporan Pengurusan Ketata Usahaan Kependudukan dan Urusan Rumah Tangga Balai

Penyelenggaraan kegiatan Dokumen / Laporan Ketata Usahaan Kependudukan dan Urusan Rumah Tangga Balai dengan dana sebesar Rp.1.138.821.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.998.348.519,00 atau 87.67%.

b. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan dana sebesar Rp. 4.615.640.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 3.466.693.934,00 atau 75,11%.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan dana sebesar Rp. 806.892.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.723.004.200,00 atau 89.60%.

d. Meningkatkan sarana dan Prasarana pengawasan

Penyelenggaraan kegiatan Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan dengan dana sebesar Rp. 532.322.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 307.317.900,00 atau 57,73%.

e. Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Jambi)

Penyelenggaraan kegiatan Observasi dan Monitoring Bergerak Frekuensi Radio Dalam Kota (Jambi) dengan dana sebesar Rp.166.365.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar RP.110.812.350,00 atau 66.61%.

f. Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jambi)

Penyelenggaraan kegiatan Operasi Penertiban Frekuensi Radio Dalam Kota (Jambi) dengan dana sebesar Rp. 35.074.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 27.656.600,00 atau 78,85%.

g. Operasi Penertiban Frekuensi Radio Luar Kota (Jambi)

Penyelenggaraan kegiatan Operasi Penertiban Radio Luar Kota dengan dana sebesar Rp.165.680.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar RP. 115.615.250,00 atau 69.78%.

h. Gelar Perkara Frekuensi Radio

Penyelenggaraan kegiatan Gelar Perkara Frekuensi radio dengan dana sebesar Rp. 15.520.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 0,00 atau 0 %.

6.KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI

Program dan Kegiatan yang dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dibiayai oleh dana APBN dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1.Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara/Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah

a. Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Layanan Perkantoran dengan dana sebesar Rp.4.932.776.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar RP. 4.932.776.000,00 atau 100%.

b. Belanja Barang

Penyelenggaraan kegiatan Belanja Barang dengan dana sebesar Rp. 2.185.427.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.128.824.440,00 atau 97,41%.

c. Belanja Modal

Penyelenggaraan kegiatan Belanja Modal dengan dana sebesar Rp.459.819.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.449.381.109,00 atau 97,73%.

7.LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Program dan Kegiatan yang dilakukan pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jambi dibiayai oleh dana APBN dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Satuan Pendidikan pada Jenis Jenjang dan Jalur Pendidikan yang terpetakan Mutu Pendidikan

Penyelenggaraan kegiatan Satuan Pendidikan pada Jenis Jenjang dan Jalur Pendidikan yang terpetakan Mutu Pendidikan dengan dana sebesar Rp.1.193.735.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.087.015.091,00 atau 91,06%.

2. Kegiatan Satuan Pendidikan pada Jenis Jenjang dan Jalur Pendidikan yang telah di Supervisi Mutu Pendidikannya

Penyelenggaraan kegiatan Satuan Pendidikan pada Jenis Jenjang dan Jalur Pendidikan yang telah di Supervisi Mutu Pendidikannya dengan dana sebesar Rp.3.802.800.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 3.227.056.080,00 atau 84,86%.

3. Kegiatan Satuan PAUDNI dan Pendidikan Dasar yang telah di Fasilitas Berdasarkan 8 Standar

Penyelenggaraan kegiatan Satuan PAUDNI dan Pendidikan Dasar yang telah di Fasilitas berdasarkan 8 Standar dengan dana sebesar Rp.3.327.342.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 2.968.987.266,00 atau 89,23%.

4. Kegiatan Satuan Pendidikan Menengah yang Telah di Fasilitas Berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan

Penyelenggaraan kegiatan Satuan Pendidikan Menengah yang Telah di Fasilitas Berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan dengan dana sebesar Rp.1.391.040.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.212.291.360,00 atau 87,15%.

5. Kegiatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Telah Difasiltasi Pengembangan Profesinya, Kompetensi dan Kualifikasinya

Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Tenaga Kependidikan yang Telah Difasiltasi Pengembangan Profesinya, Kompetensi dan Kualifikasinya dengan dana sebesar Rp. 5.463.208.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 4.506.600.279,00 atau 82,49%.

6. Kegiatan Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, Pelaporan dan Ketatausahaan

Penyelenggaraan kegiatan Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, Pelaporan dan Ketatausahaan dengan dana sebesar Rp. 699.900.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 409.791.450,00 atau 58,55%.

7. Kegiatan Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Layanan Perkantoran dengan dan sebesar Rp. 7.161.547.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 6.326.510.619,00 atau 88,34%.

8. Kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Penyelenggaraan kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan dana sebesar Rp. 335.900.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 334.338.450,00 atau 99,55%.

9. Kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan dana sebesar Rp. 581.300.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 573.452.450,00 atau 98,65%.

10. Kegiatan Gedung yang Rehab/Renovasi

Penyelenggaraan kegiatan Gedung yang Rehab/Renovasi dengan dana sebesar Rp. 924.500.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 917.104.000,00 atau 99,20%.

8. BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAMBI

BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi untuk tahun 2012 pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh dana APBN dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pemeriksa Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi

Penyelenggaraan kegiatan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dengan dana sebesar Rp.5.326.263.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.5.304.957.948,00 atau 99,60%, dengan hasil yang dicapai berupa Laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kebutuhan.

2) Kegiatan laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi

Penyelenggaraan kegiatan Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dengan dana sebesar Rp.468.276.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 463.780.550,00 atau 99,04%,

dengan hasil yang dicapai yaitu meningkatkan pengelolaan pemanfaatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3) Kegiatan Rumusan Bahan Pendapat

Penyelenggaraan kegiatan Rumusan Bahan Pendapat dengan dana sebesar Rp.9.885.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 9.299.808,00 atau 94,08%, dengan hasil yang dicapai yaitu memberikan pendapat mengenai permasalahan dan isu-isu penting yang perlu ditanggapi dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah.

4) Kegiatan Layanan Administrasi Pemeriksaan

Penyelenggaraan kegiatan Layanan Administrasi dengan dana sebesar Rp.1.047.554.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.016.420.905,00 atau 97%, dengan hasil yang dicapai yaitu melaksanakan Pemeriksaan yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan menyampaikan LHP kepada pemangku kepentingan.

5) Kegiatan Sumbangan IHPS

Penyelenggaraan kegiatan Sumbangan IHPS dengan dana sebesar Rp.113.092.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 101.420.905,00 atau 89,68%, dengan hasil yang dicapai yaitu Memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dan penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah.

6) Kegiatan Laporan Profil Entitas

Penyelenggaraan kegiatan Laporan Profil Entitas dengan dana sebesar Rp.20.390.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 16.997.104,00 atau 83,36%, dengan hasil yang dicapai yaitu memberikan informasi entitas yang menjadi objek pemeriksaan.

2. Program Manajemen Sumberdaya Manusia dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Layanan Perkantoran dengan dana sebesar Rp.4.758.722.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.4.003.512.818,00 atau 84,13%,

2) Kegiatan Layanan Kepegawaian

Penyelenggaraan kegiatan Layanan Kepegawaian dengan dana sebesar Rp.219.277.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 211.997.004,00 atau 96,68%.

3) Kegiatan Manajemen Kinerja

Penyelenggaraan kegiatan Rumusan Bahan Pendapat dengan dana sebesar Rp.163.995.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 156.008.443,00 atau 95,13.

4) Kegiatan Manajemen Karir

Penyelenggaraan kegiatan Manajemen Karir dengan dana sebesar Rp.65.760.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 62.472.000,00 atau 95%

3. Program Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Layanan Bidang Hukum

Penyelenggaraan kegiatan Layanan Bidang Hukum dengan dana sebesar Rp.230.628.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.230.166.744,00 atau 99,80%, dengan hasil yang dicapai berupa memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada pimpinan dan pegawai BPK, melaksanakan fungsi legislasi dan pelayanan informasi hukum.

2) Kegiatan Layanan Kehumasan dan Dalam Negeri

Penyelenggaraan kegiatan Layanan Kehumasan dan Dalam Negeri dengan dana sebesar Rp.168.486.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 166.346.227,00 atau 98,73%, dengan hasil yang dicapai yaitu menyediakan informasi mengenai BPK untuk internal maupun pihak eksternal serta keterbukaan informasi BPK bagi publik.

3) Kegiatan Publikasi

Penyelenggaraan kegiatan Publikasi dengan dana sebesar Rp.146.180.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 140.669.014,00 atau 96,23%, dengan hasil yang dicapai yaitu menjaga koordinasi dan hubungan yang baik antara pihak BPK Perwakilan dengan BPK pusat, instansi lain dan media.

4. Program Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Dokumen Perencanaan Anggaran

Penyelenggaraan kegiatan Dokumen Perencanaan Anggaran dengan dana sebesar Rp.201.580.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.192.690.322,00 atau 95,59%, dengan hasil yang dicapai berupa meningkatkan efektifitas dan efisiensi peran penganggaran dan perbendaharaan.

2) Kegiatan Dokumen Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Penyelenggaraan kegiatan Dokumen Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran dengan dana sebesar Rp.442.280.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 423.660.012,00 atau 95,79%, dengan hasil yang dicapai yaitu Adanya penganggaran berbasis kinerja dan memastikan usulan anggaran telah sesuai dengan basis data dan informasi yang ada.

3) Kegiatan Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Keuangan

Penyelenggaraan kegiatan laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Keuangan dengan dana sebesar Rp.138.150.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 136.727.055,00 atau 98,97%, dengan hasil yang dicapai yaitu penerapan good governance di masing-masing instansi, pemantauan anggaran untuk pengambilan keputusan dan perlunya mekanisme rekonsiliasi dalam pemutakhiran data.

5. Program Pengelolaan sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Operasional Perkantoran dan pemeliharaan

Penyelenggaraan kegiatan Operasional Perkantoran dan pemeliharaan dengan dana sebesar Rp.2.441.158.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.2.395.064.560,00 atau 98,08%, dengan hasil yang dicapai berupa mengoptimalkan penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan.

2) Kegiatan Layanan Kesekretariatan

Penyelenggaraan kegiatan layanan Kesekretariatan dengan dana sebesar Rp.285.790.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 276.501.825,00 atau 96,75%, dengan hasil yang dicapai yaitu meningkatkan pelayanan terhadap tamu perwakilan

3) Kegiatan Laporan Kegiatan dan pembinaan Bidang Umum

Penyelenggaraan kegiatan Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum dengan dana sebesar Rp.110.451.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 109.224.994,00 atau 98,89%, dengan hasil yang dicapai yaitu meningkatkan efektivitas pencatatan pengelolaan Barang Milik Negara

4) Kegiatan Perangkat Teknologi Informasi

Penyelenggaraan kegiatan Perangkat Teknologi Informasi dengan dana sebesar Rp.254.279.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 252.279.000,00 atau 99,47%, dengan hasil yang dicapai yaitu mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana dibidang perangkat computer/peripheral

5) Kegiatan Media dan Peralatan Lainnya

Penyelenggaraan Media dan Peralatan Lainnya dengan dana sebesar Rp.355.688.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 351.455.313,00 atau 98,81%, dengan hasil yang dicapai yaitu mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan

6. Program Layanan Pimpinan Perwakilan /Pusdiklat dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Layanan Pimpinan Perwakilan/Pusdiklat

Penyelenggaraan kegiatan layanan Pimpinan Perwakilan/Pudiklat dengan dana sebesar Rp.398.915.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.394.048.237,00 atau 98,78%, dengan hasil yang dicapai berupa penyediaan kebutuhan dan keperluan pelaksanaan tugas pimpinan.

9. PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk tahun 2012 pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh dana APBN dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Penyelenggaraan Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan dana sebesar Rp.6.469.947.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada program ini sebesar Rp.6.083.691.164,00 atau 94,03%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Penyelenggaraan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan dana sebesar Rp.300.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada program ini sebesar Rp.298.290.000,00 atau 99,43%.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Penyelenggaraan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan dana sebesar Rp.190.471.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada program ini sebesar Rp.189.747.210,00 atau 99,62%.

10. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk tahun 2012 pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh dana APBN dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Penyelenggaraan Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan dana sebesar Rp.2.154.338.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada program ini sebesar Rp.2.082.383.110,00 atau 96,66%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Penyelenggaraan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan dana

sebesar Rp.95.800.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada program ini sebesar Rp.94.353.420,00 atau 98,49%.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN

Penyelenggaraan Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN dengan dana sebesar Rp.5.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada program ini sebesar Rp.4.875.000,00 atau 97,50%, dengan hasil yang dicapai yaitu perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling (hakim terbang) pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan militer dan TUN serta berkas perkara tingkat pertama, Banding, Kasasi, PK, Hak Uji Materil dan Sengketa Pajak pada Pengadilan tingkat pertama dan banding yang diselesaikan tepat waktu di lingkungan peradilan militer dan TUN..

11. BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAMBI

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi untuk tahun 2012 pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh dana APBN dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Penyelenggaraan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati dengan dana sebesar Rp.2.219.258.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.2.073.452.749,00 atau

93,43%, dengan hasil yang dicapai berupa terselenggaranya layanan perkantoran selama 12 bulan layanan.

2) Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknis

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Peralatan Teknis dengan dana sebesar Rp.100.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 99.000.000,00 atau 99%, dengan hasil yang dicapai yaitu Tersedianya peralatan teknis sebanyak 2 unit/set untuk menunjang kegiatan pemeriksaan di Laboratorium Karantina

3) Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perkantoran dengan dana sebesar Rp.4.633.980.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 4.456.498.566,00 atau 96,17%, dengan hasil yang dicapai yaitu terselenggaranya layanan perkantoran selama 12 bulan layanan.

4) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor dengan dana sebesar Rp.40.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 39.452.000,00 atau 98,63%, dengan hasil yang dicapai yaitu tersedianya fasilitas kendaraan sebanyak 3 unit.

5) Kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi dengan dana sebesar Rp.99.500.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 97.529.900,00 atau 98,02%, dengan hasil yang dicapai yaitu tersedianya peralatan pengolah data dan komunikasi sebanyak 23 unit untuk menunjang operasional kegiatan

6) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan dana sebesar Rp.100.700.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 92.583.580,00 atau 91,94%.

7) Kegiatan Pembangunan Gedung/bangunan

Penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Gedung/bangunan dengan dana sebesar Rp.30.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 29.679.000,00 atau 98,93%, dengan hasil yang dicapai yaitu tersedianya fasilitas kandang hewan kesayangannyang baik seluas 10 M².

12. IAIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk tahun 2012 pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh dana APBN dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Islam, Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Model Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis program yang bermutu

Penyelenggaraan kegiatan Model Pengabdian kepada Masyarakat berbasis program yang bermutu dengan dana sebesar Rp.300.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.300.000.000,00 atau 100%.

- 2) Kegiatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Agama Islam yang memenuhi Standar

Penyelenggaraan kegiatan Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Islam yang memenuhi Standar dengan dana sebesar Rp.13.000.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.12.347.581.305,00 atau 94,98%.

- 3) Kegiatan Penelitian yang bermutu

Penyelenggaraan kegiatan Penelitian yang bermutu dengan dana sebesar Rp.420.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 420.000.000,00 atau 100%.

- 4) Kegiatan Pembinaan Kopertais

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kopertais dengan dana sebesar Rp.350.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 338.938.100,00 atau 96,84%.

- 5) Kegiatan Dokumen Layanan Diklis

Penyelenggaraan kegiatan Dokumen Layanan Diklis dengan dana sebesar Rp.150.000.000,00. Pencapaian

realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp148.208.225,00 atau 98,81%.

6) Kegiatan Kualifikasi Tenaga Pendidik melalui Dual Mode System

Penyelenggaraan kegiatan Kualifikasi Tenaga Pendidik melalui Dual Mode System dengan dana sebesar Rp.1.710.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.680.000.000,00 atau 98,25%.

7) Kegiatan Beasiswa Mahasiswa Miskin

Penyelenggaraan kegiatan Beasiswa Mahasiswa Miskin dengan dana sebesar Rp.1.390.800.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.390.800.000,00 atau 100%.

8) Kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang tersertifikasi melalui LPTK

Penyelenggaraan kegiatan tenaga pendidik dan kependidikan yang tersertifikasi melalui LPTK dengan dana sebesar Rp.2.750.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.2.750.000.000,00 atau 100%.

9) Kegiatan Layanan Perkantoran Pendidikan Tinggi Islam

Penyelenggaraan kegiatan Layanan Perkantoran Pendidikan Tinggi Islam dengan dana sebesar Rp.16.482.635.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 15.643.678.807,00 atau 99,12%.

2. Program Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas teknis Lainnya Pendis dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan layanan perkantoran dengan dana sebesar Rp.43.907.463.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. Rp.43.907.463.000,00 atau 100%.

13. PT. PLN (PERSERO) PROVINSI JAMBI

PT. PLN (PERSERO) Provinsi Jambi untuk tahun 2012 pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh dana APBN dengan pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana & Prasarana Ketenagalistrikan dengan dana sebesar Rp. 56.663.908.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.54.536.701.000,00 atau sebesar 96,25%. Pelaksanaan program ini terdiri atas 3 kegiatan yang masing-masing terdiri dari :

- a. Kegiatan Pembangunan Gardu Induk/Distribusi dengan alokasi dana sebesar Rp.8.375.232.000,00 dan realisasi mencapai Rp.8.373.986.000,00 atau 99,99%.
- b. Kegiatan Pembangunan Jaringan, yang terdiri dari belanja modal, irigasi dan jaringan SUTR dan SUTM dengan dana sebesar Rp.44.886.976.000,00 dan realisasi mencapai Rp.44.886.640.000,00 atau sebesar 100%.
- c. Kegiatan Program Listrik Murah dan Hemat dengan dana sebesar Rp.3.401.700.000,00 dan realisasi mencapai Rp.1.276.075.000,00 atau 37,51%.

14. BKKBN PROVINSI JAMBI

BKKBN Provinsi Jambi untuk tahun 2012 pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh dana APBN dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Rancangan Induk pengendalian Penduduk Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Rancangan Induk pengendalian Penduduk Provinsi dengan dana sebesar Rp.275.930.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.271.035.000,00 atau 98,23%.

2) Kegiatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Provinsi dengan dana sebesar Rp.2.696.178.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.2.684.999.000,00 atau 99,59%.

3) Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi dengan dana sebesar Rp.1.856.857.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.805.803.500,00 atau 97,25%, dengan hasil yang dicapai yaitu terbentuknya kelompok BKB sebanyak 1.253, kelompok BKB paripurna sebanyak 131, kelompok BKL sebanyak 702, kelompok BKR sebanyak 921, kelompok BKR Paripurna sebanyak 131, kelompok PIK sebanyak 269, kelompok UPPKS sebanyak 960, serta terbinanya keluarga yang

aktif pada kelompok BKB aktif sebanyak 64.321, balita aktif BKB sebanyak 63.300, kelompok BKL sebanyak 24.732, kelompok BKR paripurna sebanyak 131, kelompok BKR sebanyak 921, dan keluarga BKR aktif sebanyak 43.117.

4) Kegiatan Advokasi dan Penggerakan Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Advokasi dan Penggerakan Provinsi dengan dana sebesar Rp. 1.456.420.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.349.488.500,00 atau 92,66%.

5) Kegiatan Mitra Kerja Program Kependudukan dan KB Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Mitra Kerja Program Kependudukan dan KB Provinsi dengan dana sebesar Rp.594.448.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.583.752.000,00 atau 98,20%.

6) Kegiatan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB Provinsi dengan dana sebesar Rp.1.375.325.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.336.883.000,00 atau 97,20%.

7) Kegiatan SDM yang Terdidik dan Terlatih Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan SDM yang Terdidik dan Terlatih Provinsi dengan dana sebesar Rp.3.146.651.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.3.059.127.300,00 atau 97,22%.

8) Kegiatan Penelitian Kependudukan dan KB Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Penelitian Kependudukan dan KB Provinsi dengan dana sebesar Rp.303.730.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.300.980.000,00 atau 99,09%.

9) Kegiatan Dukungan Manajemen BKKBN Provinsi

Penyelenggaraan kegiatan Dukungan Manajemen BKKBN Provinsi dengan dana sebesar Rp.1.083.545.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.035.164.900,00 atau 95,54%.

10)Kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Program Kependudukan dan KB

Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Kependudukan dan KB dengan dana sebesar Rp.1.316.680.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.220.262.550,00 atau 92,68%.

11)Kegiatan PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapat Dukungan Operasional

Penyelenggaraan kegiatan PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapat Dukungan Operasional dengan dana sebesar Rp.587.312.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.587.312.000,00 atau 100%.

12)Kegiatan Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB di Lini Lapangan

Penyelenggaraan kegiatan Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB di Lini Lapangan dengan dana sebesar Rp.1.134.437.000,00. Pencapaian

realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.134.437.000,00 atau 100%.

13) Kegiatan Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Layanan Perkantoran dengan dana sebesar Rp.5.658.593.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.5.584.670.741,00 atau 98,69%.

14)Kegiatan Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraan kegiatan Kendaraan Bermotor dengan dana sebesar Rp.312.440.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.312.140.000,00 atau 99,90%.

15)Kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Penyelenggaraan kegiatan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan dana sebesar Rp.97.280.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.96.320.000,00 atau 99,01%.

16)Kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan dana sebesar Rp.326.170.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.322.565.000,00 atau 98,89%.

17)Kegiatan Gedung dan Bangunan

Penyelenggaraan kegiatan Gedung dan Bangunan dengan dana sebesar Rp.151.845.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.151.045.000,00 atau 99,47%.

15. BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I JAMBI

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jambi untuk tahun 2012 pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh dana APBN dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Layanan Perkantoran dengan dana sebesar Rp.1.575.004.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.1.575.004.000,00 atau 100%.

- 2) Kegiatan Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Penyelenggaraan kegiatan Dokumen Dukungan Manajemen Pelaksanaan Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan dana sebesar Rp.292.460.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.292.167.540,00 atau 99,90%, dengan hasil yang dicapai yaitu Tersusunnya laporan kegiatan dan anggaran, laporan tahunan, lakip, SAI/BMN, Sisterkaroline, tersedianya pelatihan administrative dan pengelolaan kepegawaian dan fungsional

- 3) Kegiatan Sarana dan Prasarana Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Penyelenggaraan kegiatan Sarana dan Prasarana Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan dana sebesar Rp.170.400.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 168.133.680,00 atau 98,67%, dengan hasil yang dicapai yaitu tersedianya alat laboratorium yang memenuhi kebutuhan lab penguji

4) Kegiatan Pelayanan Karantina Ikan dan Mutu Hasil perikanan

Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan dengan dana sebesar Rp.656.458.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 655.998.479,00 atau 99,93%, dengan hasil yang dicapai yaitu terselenggaranya pemantauan HPI/HPIK di Wilayah Jambi, pengawasan media pembawa di Bandara Sulthan Thaha dan Wilker Kuala Tungkal, tersedianya bahan uji untuk penyelenggaraan lab penguji SKIPM Jambi dan tersedianya pelatihan teknis

5) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan dana sebesar Rp.15.000.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 14.397.000,00 atau 95,98%.

6) Kegiatan Perangkat pengolah Data

Penyelenggaraan kegiatan Perangkat Pengolah Data dengan dana sebesar Rp.15.847.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 15.799.459,00 atau 99,70%.

7) Kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Penyelenggaraan kegiatan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan dana sebesar Rp.61.735.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 61.648.571,00 atau 99,86%.

8) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dengan dana sebesar Rp.163.300.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 162.352.860,00 atau 99,42%.

16. KEJAKSAAN TINGGI JAMBI

Kejaksaan Tinggi Jambi untuk tahun 2012 pelaksanaan program dan kegiatan dibiayai oleh dana APBN dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Penyelenggaraan Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI dengan dana sebesar Rp.912.767.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.874.795.892,00 atau 95,84%.

2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI

Penyelenggaraan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI dengan dana sebesar Rp.560.205.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.288.393.534,00 atau 51,48%.

3. Program Penyelidikan/Pengamanan Panggalangan Kasus Intelijen

Penyelenggaraan Program Penyelidikan/Pengamanan Panggalangan Kasus Intelijen dengan dana sebesar Rp.394.800.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.277.939.200,00 atau 70,40%.

4. Program Penanganan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Penyelenggaraan Program Penanganan Penyelesaian Perkara Pidana Umum dengan dana sebesar Rp.821.095.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.83.423.252,00 atau 10,16%.

5. Program Penanganan dan penyelesaian Perkara Pidana Khusus, HAM Pelanggaran yang Berat dan Perkara TP Korupsi

Penyelenggaraan Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, HAM Pelanggaran yang Berat dan Perkara TP Korupsi dengan dana sebesar Rp.661.775.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.356.630.547,00 atau 53,89%.

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Penyelenggaraan Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan dana sebesar Rp.95.865.000,00. Pencapaian realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.14.734.450,00 atau 15,37%.

6.3.1. Permasalahan dan Solusi

Sejauh ini belum ditemui permasalahan dalam kerjasama ini, karena secara umum pelaksanaan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012.

6.4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Penegasan batas daerah sangat penting dalam rangka menyelenggarakan tertib administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Apabila tidak adanya batas daerah yang jelas dan pasti baik secara yuridis maupun secara fisik di lapangan, suatu daerah tidak dapat merencanakan, melaksanakan bahkan dalam mengawasi pelaksanaan suatu kegiatan dengan baik. Kewenangan penegasan batas daerah antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri, sebagaimana ditegaskan pada pasal 19 ayat 1 Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, menyatakan bahwa “Keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”.

Tahapan pelaksanaan penegasan batas daerah di darat, sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan yaitu penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pular batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta batas. Sedangkan penegasan batas daerah di laut dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan yaitu penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar titik acuan, penentuan titik awal dan garis dasar, pengukuran dan penentuan batas, serta pembuatan peta batas.

Tabel.6.1 Pelaksanaan Penegasan Batas Provinsi Jambi Dengan Provinsi Tetangga Tahun 2012

NO	SEGMENT BATAS PROVINSI	PANJANG (KM)	TARGET (KM/PILAR)	REALISASI (KM/PILAR)	PERSentase (%)	KETERANGAN
1	Jambi-Sumsel	539	539	539	100	Proses penyiapan dokumen batas
2	Jambi-Bengkulu	128	128	128	100	Proses penetapan Permendagri
3	Jambi-Sumbar	258,5	14 pilar	17 pilar	121,42	Proses penyelesaian batas antara Bungo dan Tebo dengan Dharmasraya
4	Jambi-Riau	276	276	276	100	Proses penetapan Permendagri
5	Jambi-Kep. Riau	-	-	-	-	Batas di Laut
	JUMLAH (KM)	1.201,5	-	-	-	-

1. Realisasi Pelaksanaan Antar Wilayah Provinsi

Provinsi Jambi memiliki 5 (lima) segmen batas dengan Provinsi tetangga yaitu 4 (empat) segmen batas di darat sepanjang 1.201,5 km meliputi segmen batas Jambi – Bengkulu 128 km, Jambi – Riau 276 km, Jambi – Sumbar 258,5 km, dan segmen batas Jambi – Sumsel 539 km, seluruhnya telah dilaksanakan pelacakan dan pengukuran di lapangan. Sedangkan 1 (satu) segmen batas di laut yaitu batas dengan Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini masih dalam proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi RI, khususnya mengenai kepemilikan Pulau Berhala.

Adapun proses penyelesaian batas antar Provinsi Jambi yang telah dilakukan meliputi :

a. Penegasan Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Bengkulu.

Penegasan batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Bengkulu di lapangan dimulai sejak tahun 1993/1994 sampai dengan tahun 2003. Segmen batas dimaksud seluruhnya sepanjang 128 km, dimulai dari simpul segitiga batas daerah antara Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu di puncak Bukit Hulu Kulus sampai dengan simpul segitiga batas daerah antara Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat di puncak Bukit Mentango. Seluruhnya telah dilaksanakan penegasannya di lapangan, hasilnya telah disepakati ke dua Gubernur dan tidak ada permasalahan. Untuk legalitas penegasan batas dimaksud, pada tahun 2012 oleh ke dua Pemerintah Provinsi telah melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan telah disepakati serta telah diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Saat ini sedang diproses penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Bengkulu di Kementerian Dalam Negeri RI.

b. Penegasan Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau.

Penegasan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau di lapangan dimulai sejak tahun 1994/1995 sampai dengan tahun 2004. Segmen batas dimaksud seluruhnya sepanjang 276 km, dimulai dari titik simpul segitiga batas daerah antara Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, terletak di kebun Kelapa Sawit milik PT. SAK di Muara Timpeh sampai dengan

Batas daerah Kabupaten Tanjungjabung Barat Provinsi Jambi dengan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau di Muara Suak Labu, pinggir pantai Timur. Untuk memperoleh legalitas penegasan batas dimaksud, ke dua Pemerintah Provinsi pada tahun 2012 telah melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan telah disepakati serta telah diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri RI, saat ini sedang diproses penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau di Kementerian Dalam Negeri RI.

c. Penegasan Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Penegasan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan di lapangan dimulai sejak tahun 1986/1987 sampai dengan tahun 2003. Segmen batas dimaksud seluruhnya sepanjang 539 km, dimulai dari simpul segitiga batas daerah antara Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu di puncak Bukit Hulu Kulus sampai dengan batas daerah antara Kabupaten Tanjungjabung Timur Provinsi Jambi dengan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Barat di Muara Sungai Benuh, Pinggir pantai Timur dan hasilnya telah disepakati ke dua Gubernur. Dalam penyelesaian batas wilayah antar Provinsi ini masih ditemui permasalahan yang meliputi :

1. Terdapat ruas batas antara Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun dengan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas sepanjang 32 km, tidak dapat dilaksanakan penegasannya di lapangan karena medannya sangat berat dan sulit dijangkau oleh manusia.

2. Batas antara Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dengan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Penduduk Rawas Ulu minta agar batas yang telah ditegaskan dan telah disepakati ke dua Gubernur dapat digeser ke arah Singkut.

Penyelesaian masalah tersebut terutama pada ruas batas sepanjang 32 km yang tidak dapat dilaksanakan penegasannya di lapangan, telah disepakati tidak diukur ataupun dipasang patok di lapangan, akan tetapi disepakati oleh ke dua Pemerintah Provinsi, untuk ditetapkan titik koordinatnya di atas peta/diploting diatas peta Topografi direproduksi tahun 1954 dengan skala 1 : 100.000. Sedangkan penyelesaian masalah batas Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas, telah disepakati pada rapat yang difasilitasi oleh Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tanggal 28 November 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani oleh ke dua Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang berbatasan serta Dirjen PUM, bahwa batas ke dua daerah tetap sesuai hasil penegasan yang telah dilaksanakan dan telah disepakati sebagaimana peta penegasan batas ke dua daerah yang ditandatangani oleh ke dua Gubernur. Untuk legalitas dan percepatan penegasan batas ke dua daerah, pada tahun 2013 ke dua Pemerintah Provinsi akan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk selanjutnya dapat diproses penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas

Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2013, dijadwalkan untuk disepakati bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk diproses penerbitan Permendagrinya.

d. Penegasan Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat.

Segmen batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat sepanjang 258,5 km, dilaksanakan penegasannya di lapangan mulai tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 2003 yang dimulai dari simpul segitiga batas daerah antara Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat di puncak Bukit Mentango sampai dengan titik simpul segitiga batas daerah antara Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, terletak di kebun Kelapa Sawit milik PT. SAK di Muara Timpeh.

Dari proses penyelesaian ini masih ditemui permasalahan di lapangan, dimana masyarakat Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi menghendaki batas ke dua daerah digeser ke arah Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, ke dua pemerintah daerah dan tokoh masyarakat yang berbatasan mengadakan pertemuan di Bukittinggi tanggal 14 Oktober 2009 dan menyepakati antara lain, bahwa pedoman penegasan batas di lapangan antara ke dua daerah semula berdasarkan Peta Topografi Tahun 1933, disepakati diubah dengan berdasarkan kepada "Tambo dan Ranji". Dari permasalahan dalam penyelesaian batas ini, telah

dilakukan kesepakatan kedua Provinsi untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi :

1. Pembangunan Gapura Selamat Datang oleh Ke dua Pemerintah Provinsi yang peletakan Batu Pertama Pembangunannya, dilaksanakan pada tanggal 4 November 2010.
2. Pelacakan batas di lapangan dengan berpedoman kepada “Tambo dan Ranji”, telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2010 belum dapat disepakati karena pihak Pemerintah Daerah dari Sumatera Barat tidak hadir di lapangan.
3. Selanjutnya, mulai bulan Mei s/d November 2012 telah disepakati dan terpasang 13 (tiga belas) pilar batas dari 11 (sebelas) yang direncanakan, namun masih terdapat 1(satu) titik batas yang belum disepakati yaitu batas antara Dusun Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo dengan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera (Bungo-Padang) dikarenakan pihak Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Kecamatan dan Nagari Sungai Rumbai tidak hadir pada saat pelaksanaan penegasan batas di lapangan.
4. Pada tanggal 19 Desember 2012, diagendakan pertemuan antara ke dua Pemerintah daerah yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi, namun pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat minta ditunda karena tidak dapat hadir disebabkan oleh sesuatu hal. Untuk itu, akan dikoordinasikan dan dijadwalkan kembali pertemuan dimaksud dalam upaya penyelesaian masalah batas ke dua daerah.

e. Penegasan Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Lingga) yang merupakan batas di laut belum dilaksanakan penegasannya. Khusus mengenai status kepemilikan Pulau Berhala, sesuai dengan “Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala”, Pulau Berhala masuk dalam wilayah Kabupaten Kabupaten Tanjungjabung Timur Provinsi Jambi. Namun Keputusan Mendagri dimaksud, dibatalkan dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 49 P/HUM/2011 tanggal 31 Januari 2012 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Lingga. Kemudian, Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi RI, Uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga dan Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, saat ini masih dalam proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi RI.

2. Realisasi dan Pelaksanaan Antar Wilayah Kabupaten/Kota

Terkait dengan Penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi (Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi) pada tahun 2012 sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan penegasan batas. Dari 10 (sepuluh) kegiatan penegasan batas dimaksud, 9 (sembilan) kegiatan telah diselesaikan seluruhnya (100 %). Sedangkan 1 (satu) kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri

yaitu penegasan batas daerah antara Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Tebo dari 138,5 km panjang segmen batas seluruhnya, terlaksana dan disepakati 95,5 km (68,95 %), dan 43 km (31,05 %) belum disepakati ke dua daerah yang berbatasan. Untuk mengetahui realisasi/hasil yang dicapai oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi dalam rangka fasilitasi penegasan batas daerah antara Kabupaten/Kota pada tahun 2012, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 6.2 Penegasan Batas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun 2012

NO	SEGMENT BATAS KABUPATEN/KOTA	PANJANG (KM)	TARGET TH 2012	REALISASI TH 2012	(%)	KETERANGAN
1	Tanjabbar – Batanghari	71,6	71,6 Km	71,6 Km	100	Pelacakan dan Pemasangan Pilar
2	Tanjabbar – Tebo	42,6	42,6 Km	42,6 Km	100	Pelacakan dan Pemasangan Pilar
3	Sarolangun- Tebo	5	5 Km	5 Km	100	Pelacakan dan Pemasangan Pilar
4	Bungo – Merangin	144	3 Titik	3 Titik	100	Pelacakan dan Pemasangan Pilar
5	Merangin – Kerinci	100	15 Km	15 Km	100	Pelacakan dan Pemasangan Pilar
6	Bungo – Tebo	138,5	138,5 Km	95,5 Km	68,95	Pelacakan dan Pemasangan Pilar
7	Batanghari- Ma. Jambi	156	10 Km	10 Km	100	Pelacakan dan Pemasangan Pilar
8	Tanjabbar – Tanjabtim	66	2, 4 Km	2,4 Km	100	Pelacakan dan Pemasangan Pilar
9	Segitiga Simpul Batas Tanjabbar, Tebo dan Batanghari	-	1 Titik	1 Titik	100	Titik simpul segitiga batas
10	Segitiga Simpul Batas Tebo, Merangin dan Sarolangun	-	1 Titik	1 Titik	100	Titik simpul segitiga batas

6.5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk perlindungan atas **bencana**, maka pemerintah pusat

dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 **Bencana alam** antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. **Bencana non alam** antara lain kebakaran hutan/lahan/pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. **Bencana sosial** antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Jika dilihat dari letak geografis Provinsi Jambi, potensi bencana meliputi bencana alam gunung berapi dan sebahagian terimbas pada wilayah gempa tektonik pada bagian barat seperti Kerinci, Kota Sungai Penuh dan sebahagian Kabupaten Merangin. Selain itu juga memiliki potensi banjir pada wilayah Daerah Aliran Sungai Batanghari yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota, kebakaran hutan/lahan yang diakibatkan oleh aktifitas sosial ekonomi masyarakat, angin puting beliung di beberapa wilayah dan tanah longsor pada daerah hulu DAS Batanghari.

Sebagai tindak lanjut upaya pencegahan dan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi, dan dengan didasari oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan peraturan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2008 tentang edoman pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah maka telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan oleh Perda Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi yang bertanggungjawab terhadap Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut untuk tingkat Provinsi dengan tetap berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana baik tingkat Pusat maupun Kabupaten/Kota.

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2012, melalui APBD Provinsi Jambi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.100.436.795,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.508.195.490,- atau serapan sebesar 85,56 % dengan program dan kegiatan sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.3 Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta alokasi anggaran dan realisasi Tahun 2012

Program / Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
Program pelayanan Administrasi	1.418.884.745		
Perkantoran			
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	9.360.000	4.327.210	46,23
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	274.600.000	208.062.666	75,77
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	116.690.000	110.741.000	94,90
Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	53.000.000	52.260.000	98,60
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000	44.950.000	99,89
Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.719.000	14.703.875	99,90
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	14.960.300	99,74

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25.000.000	24.900.000	99,60
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	44.000.000	38.417.000	87,31
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	452.515.745	449.118.949	99,25
Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	768.434.000		-
Kegiatan pengadaan Kendaraan dinas/operasional	360.000.000	352.000.000	97,78
Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	163.400.000	152.777.000	93,50
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan listrik dan elektronik	39.500.000	25.500.000	64,56
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.534.000	98.334.590	49,04
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000	5.000.000	0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27.600.000		-
Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	27.600.000	25.500.000	92,39
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000		-
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	55.000.000	41.390.000	75,25
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	365.016.000		-
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	88.836.800	61.231.200	68,93
Program Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	176.195.000		-
Kegiatan BinteK Relawan dan Aparatur Penanggulangan Bencana	176.195.000	125.396.100	71,17
Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	326.200.000		-
Kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan	97.570.000	94.580.000	96,94

Bencana			
Kegiatan Sosialisasi Daerah rawan Bencana Pada BPBD Provinsi Jambi	114.220.000	97.052.500	84,97
Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana	114.410.000	113.387.500	99,11
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	839.066.250		-
Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Darurat	328.066.250	292.060.700	89,02
Kegiatan Koordinasi dan Penyediaan Bahan Logistik	511.000.000	358.577.500	70,17
Program Pembinaan Penanggulangan Darurat dan Logistik	131.000.000		-
Kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan Bencana	131.000.000	112.693.500	86,03
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	269.220.000		-
Kegiatan Fasilitasi dan Kerjasama dengan Pihak Lain Dalam Penanganan Pasca Bencana	139.170.000	106.680.300	76,65
Kegiatan Sosialisasi Perundang-Undangan Bencana	130.050.000	123.518.600	94,98

2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

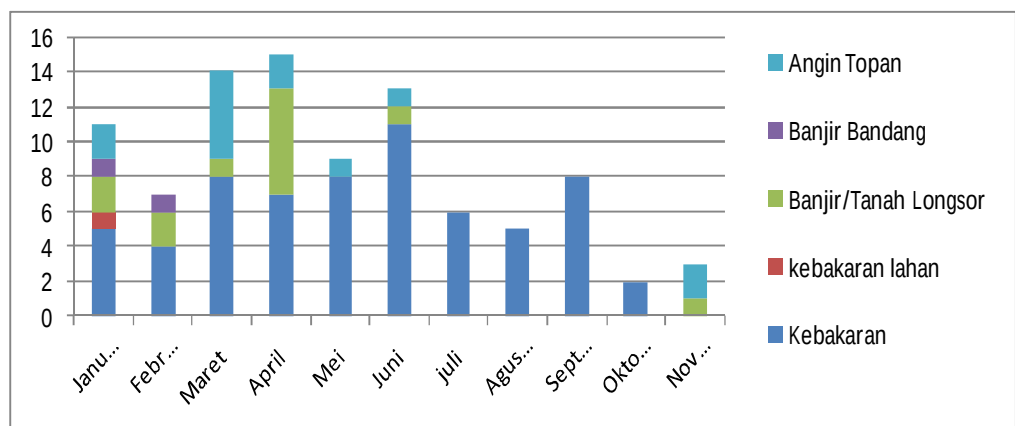
Dari pelaksanaan program dan kegiatan ini telah telah memberikan dampak terhadap penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana yang meliputi :

- 1) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana melalui kegiatan rapat koordinasi BPBD
- 2) Melalui program penyelenggaraan pendidikan dan latihan tenaga teknis dan masyarakat telah dilaksanakan pelatihan masyarakat dan relawan penanggulangan bencana sebagai tenaga inti sebanyak 80 orang.

- 3) Bintek relawan dan aparaturnya penanggulangan bencana dengan peserta terdiri dari BPBD, Kesbanglinmas, Aparatur Damkar dan Desa Tangguh
- 4) Dalam mengimplementasikan program penghimpunan data dan informasi pembangunan daerah telah terlaksana kegiatan sosialisasi perundang-undangan penanggulangan bencana dengan peserta sebanyak 60 orang dari BPBD/Kesbangpol provinsi Jambi, sosialisasi daerah rawan bencana dan tersusunnya rencana aksi daerah penanggulangan bencana provinsi jambi sebagai upaya untuk melakukan antisipasi dan pencegahan serta kesiagaan dalam menghadapi bencana
- 5) Dalam mendukung terlaksananya program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam juga telah diimplementasikan melalui terselenggaranya penanganan darurat bencana, rapat koordinasi dan evaluasi penanganan darurat penanggulangan bencana serta penyediaan logistic. Kegiatan ini juga didukung dengan penguatan dan pemahaman kemampuan tenaga teknis Tim Reaksi Cepat di Provinsi Jambi.
- 6) Dalam mendukung program pembinaan penanganan darurat dan logistic telah dilakukan kegiatan pendukung operasional penelenggaraan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS) melalui pelatihan Disaster Application Update Network (DAUN) dan Disaster Management Information System (DMIS) dengan melibatkan unsure BPBD Provinsi dan Kab/Kota lingkup Provinsi Jambi, SAR, BMKG, Polda Jambi dan Korem 042 Garuda Putih.

- 7) Sebagai bentuk realisasi Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (Pasca Bencana) telah dilakukan kegiatan fasilitasi dan kerjasama pihak lain dalam upaya penanganan pasca bencana serta memberikan pelatihan kepada tenaga pengelola dan verifikasi data lokasi pasca bencana yang diikuti oleh peserta dari BPBD/Kesbanglinmas Kab/Kota.
- 8) Selanjutnya, untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi perkantoran dan disiplin aparatur serta peningkatan sarana prasarana kantor merupakan kegiatan rutinitas dalam mendukung kinerja aparatur pemerintahan.

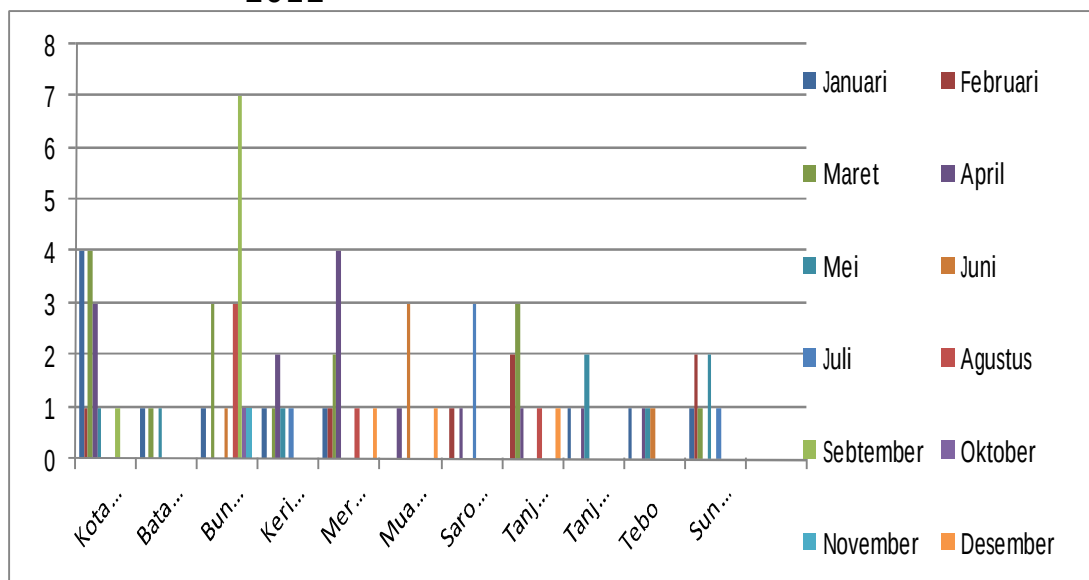
Secara umum kondisi kebencanaan di Provinsi Jambi dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012, data bulan April 2012 menunjukkan peningkatan jumlah bencana sekitar 96 %. Pada bulan April 2012 jumlah kejadian bencana tertinggi yaitu 13 kali.



Gambar 6.1. Kejadian Bencana di Jambi Bulan Januari – Desember 2012

Pengumpulan data kejadian bencana tidak terlepas dari partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik di BPBD instansi terkait di Kab/Kota. PUSDALOPS PB BPBD melakukan verifikasi dan validasi data kebencanaan dengan BPBD di Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan tersebut, diperoleh kumpulan data kejadian bencana yang semakin lengkap. Pada tahun 2012 dari 5 kejadian, kebakaran mendominasi Kejadian Bencana yaitu sebanyak 65 Kejadian Kebakaran, Bencana Banjir/Tanah Longsor sebanyak 19 Kejadian, Angin Putting Beliung 13 Kejadian dan Banjir Bandang 2 Kejadian serta Kebakaran Hutan 1 Kejadian. Selama Bulan Januari – Desember 2012 tercatat 99 Kejadian Bencana, Kejadian Bencana terbanyak berada di kota Jambi sebanyak 18 kejadian. Dapat dilihat pada *Gambar 3*

Gambar 6.2. Kabupaten yang Mengalami Kejadian Bencana Paling Banyak Selama Bulan Januari – Desember 2012



Bencana yang terjadi selama bulan Januari – Desember 2012, telah mengakibatkan timbulnya korban dan kerusakan yang tidak sedikit. Kebakaran merupakan bencana yang paling dominan terjadi pada bulan Januari – Desember 2012 di Provinsi Jambi. Data rekapitulasi bencana bulan Januari – Desember 2012 berdasarkan jenis bencana, jumlah kejadian, korban dan rumah rusak.

Tabel 6.4 Rekapitulasi Kejadian Bencana Januari – Desember 2012

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa		Rumah Rusak (Unit)
		Meninggal dan Hilang	Menderita dan Mengungsi	
Kebakaran	65	-	1172	233
Kebakaran hutan	1	-	-	-
Banjir/Tanah Longsor	18	2	62064	12391
Banjir bandang	2	1	7781	1553
Angin putting beliung	13	-	1953	388
Total	99	3	72970	14565

Sedikitnya jumlah korban ini tidak terlepas dari peran serta instansi terkait dan sumber daya manusia sebagai pelaku penanggulangan bencana yang semakin meningkat serta dukungan pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang semakin efektif baik dalam hal kebijakan maupun Prosedur Operasional secara koordinatif. Selain itu juga meningkatnya pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana akan mengurangi resiko bencana.

3. Korban

Korban kejadian banjir/tanah longsor, kebakaran, kebakaran lahan, angin kencang dan banjir bandang yang banyak menelan korban adalah Banjir Bandang.

- a. Meninggal dan Hilang; Dari 5 (Lima) jenis kejadian bencana yang terjadi selama bulan Januari – Desember 2012 Banjir Bandang menimbulkan korban Jiwa 1 orang dan Banjir/Tanah Longsor yang menimbulkan korban Jiwa sebanyak 2 orang.
- b. Menderita dan Mengungsi; Jumlah korban menderita dan mengungsi akibat bencana yang terjadi selama bulan Januari – Desember 2012 sebanyak 72.970 orang. Dari jumlah korban tersebut yang paling banyak adalah akibat Banjir/Tanah Longsor , yaitu sebanyak 62.064 orang, dimana 49.840 orang diantaranya merupakan korban menderita dan mengungsi akibat bencana Banjir/Tanah Longsor di Kabupaten Muaro Jambi yang merendam 7 Kecamatan yang terdiri dari 32 Desa yang telah merendam 9968 unit rumah penduduk, pada bulan Desember 2012.

4. Kerusakan

Kerusakan yang terjadi pada Januari – Desember 2012 selain menimbulkan korban juga mengakibatkan kerusakan rumah penduduk maupun sarana dan prasarana umum. Selama bulan Januari – Desember 2012, rumah penduduk yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak berat serta rusak total sebanyak 14.565 unit (Gambar 5). Dari jumlah kerusakan tersebut, bencana Banjir/Tanah Longsor menimbulkan kerusakan rumah penduduk paling banyak pada bulan Desember 2012 yaitu sebanyak 9968 unit.

5. Korban dan Kerusakan Berdasarkan Jenis Bencana

- a. **Tanah Longsor;** Tanah longsor merupakan salah satu gerakan massa tanah atau batuan, atau campuran keduanya, yang menuruni atau keluar dari lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun

lereng tersebut. Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi (terutama kemiringan lereng), kondisi batuan atau tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, karena kondisi kemiringan lereng, batuan/tanah dan tata air, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu longsor. Selama bulan Januari – desember 2012, bencana Tanah Longsor terjadi di Kabupaten Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Merangin . Di Kabupaten kota Sungai Penuh terjadi 2 kali yang terjadi di Desa Talang Lindung dan Km 29 serta Km 32 Jalur Puncak.

Tabel. 6.5 Data Korban dan Kerusakan Akibat Bencana Tanah Longsor Bulan Januari – Desember 2012

Kab/Kota	Jumlah Kejadian	Korban			Kerusakan		
		Meninggal dan Hilang	Luka/ Sakit	Menderita dan mengungsi	Rumah	Fasilitas Umum	Sawah (ha)
		(Jiwa)			(Unit)		
Kota Sungai Penuh	2	-	-	-	-	3.7	3
Merangin	1	-	-	-	-	3	
Total	3	-	-	-	-	6,7	3

b. Banjir

Kemampuan atau daya tampung dari satu system pengaliran air tidak selamanya sama. Perubahan daya tampung dapat terjadi akibat sedimentasi, penyempitan sungai atau tersumbat sampah. Penggundulan hutan atau perubahan fungsi lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) juga dapat menyebabkan peningkatan debit banjir karena

air yang masuk kedalam sisitem aliran menjadi tinggi. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air terutama pada daerah pemukiman yang padat dengan bangunan, jika terjadi hujan dengan curah yang tinggi dapat mengakibatkan meningkatnya volume air yang masuk ke dalam sisitem sungai sehingga kapasitasnya melampaui dan mengakibatkan banjir. Bencana Banjir yang terjadi pada Bulan Januari - Desember 2012 terjadi sebanyak 18 kali. Banjir yang terparah terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yang merendam sebanyak 9968 Unit Rumah, 13 Unit Sekolah/Madrasah, 1 Unit Tempat Ibadah, 2 Jembatan 1.000 Ha Sawah, 1.700 Ha Kebun, 70 Unit Kolam serta 41.000 Meter jalan merendam.

Table 6.6 Data Korban dan Kerusakan Akibat Bencana Banjir Bulan Januari – Desember 2012

Kab/Kota	Jumlah Kejadian	Korban			Kerusakan		
		Meninggal dan Hilang	Luka/Sakit	Menderita dan mengungsi	Rumah	Fasilitas Umum	Sawah (ha)
		(Jiwa)			(Unit)		
Tebo	1	-	-	-	-	2	-
Sarolangun	2	-	-	-	669	2	180
Kota Jambi	1	-	-	-	-	-	-
Muaro Jambi	2	-	-	-	9968	16	2863
Tanjabbar	1	--	-	-		-	-
Merangin	8	-	-	-	1619	31	80
Kerinci	3	-	-	-	283	9	44
Total	18	-	-	-	12539	60	3167

c. Angin Topan

Angin topan merupakan pusaran angin kencang dan sering terjadi diantara garis balik utara dan selatan. Angin kencang ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam

suatu sistem cuaca. Angin kencang yang terjadi di daerah tropis dapat mencapai kecepatan 120 Km/jam atau lebih dan umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim. Indonesia bukan merupakan daerah lintasan angin *cyclone* tropis, oleh karena itu akibat bencana yang ditimbulkan oleh angin kencang tersebut tidak terlalu besar. Meskipun jumlah kejadian bencana Angin Putting Beliu/Angin Topan sedikit di Bulan Januari – Desember 2012 sebanyak 13 kejadian, tetapi menimbulkan kerusakan yaitu 388 unit rumah, 1 unit sekolah dan 2 unit Tempat Ibadah, 4 Sarana Kesehatan, 1 Unit Kantor yang mengakibatkan korban Luka 9 Jiwa serta Korban mengungsi sebanyak 1953 jiwa.

Tabel 6.7 Data Korban dan Kerusakan Akibat Bencana Angin Topan Bulan Januari – Desember 2012

Kab/Kota	Jumlah Kejadian	Korban			Kerusakan		
		Meninggal dan Hilang	Luka / Sakit	Menderita dan mengungsi	Rumah	Fasilitas Umum	Sawah (ha)
		(Jiwa)			(Unit)		
Batanghari	4	-	8		315	3	-
Kota Sungai Penuh	2	-	1		13	3	-
Merangin	2	-	-		4	-	-
Kota Jambi	1	-	-		15	-	-
Tebo	1	-	-		50	-	-
Kerinci	2	-	-			1	-
Tanjabbar	1	-	-		1	-	-
Total	13	-	9	1953	388	7	-

d. Kebakaran

Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat dilanda api sehingga menimbulkan korban dan kerugian. Bangunan tersebut antara lain rumah/permukiman, pabrik, pasar dan lain – lain. Berdasarkan laporan selama bulan Januari – Desember 2012, bencana kebakaran di Provinsi Jambi sebanyak 65 kejadian yang tersebar di Kabupaten/Kota. Kabupaten yang paling sering terjadi kebakaran yaitu Kabupaten Bungo sebanyak 16 kejadian serta Kota Jambi dan Kabupaten 14 Kejadian.

Tabel 6.8 Data Korban dan Kerusakan Akibat Bencana Kebakaran Bulan Januari – Desember 2012

Kab/Kota	Jumlah Kejadian	Korban			Kerusakan			
		Meninggal dan Hilang	Luka/ Sakit	Menderita dan mengungsi	Rmh	Fasilitas Umum	Ki	Lahan
								(ha)
		(Jiwa)			(Unit)			
Kota Jambi	14	-	1	95	19	2	2	1
Tanjabbar	12	-	2	516	107	-	1	-
Kerinci	5	-	2	170	34	-	-	1
Merangin	4	-	-	17	3	-	11	-
Tanjabtim	4	-	-	45	10	2	-	1
Sungai Penuh	3	-	-	28	5	1	-	-
Bungo	16	-	-	59	9	6	1	-
Sarolangun	2	-	-	150	29	-	-	2
Tebo	2	-	1	22	4	-	-	-
Muaro Jambi	3	-	1	70	13	-	-	3
TOTAL	65	-	7	1172	233	11	15	8

Dari 5 kejadian bencana selama bulan Januari – Desember 2012 yang tercatat di Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), Tim Reaksi Cepat (TRC), Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kab/Kota Provinsi Jambi, terdapat beberapa kejadian bencana yang mengakibatkan dampak cukup besar baik dari segi korban maupun kerusakan. Salah satu kejadian bencana yang cukup besar terjadi pada bulan Februari 2012 yaitu bencana Banjir Bandang yang terjadi di Kabupaten Merangin, Kecamatan Tabir dan Margo Tabir Kelurahan Dusun Baru, Kelurahan Kampung Baru, Desa Tanjung Ilir serta Desa Lubuk Bumbun yang mengakibatkan 1 Orang Meninggal Dunia 574 Unit rumah terendam, 6 Sekolah dan 1 tempat Ibadah serta 5 KM jalan Terendam.

Selanjutnya, juga kebakaran rumah sering terjadi di Provinsi Jambi, terutama di Kota Jambi. Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), Tim Reaksi Cepat (TRC), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi mencatat 65 kali kejadian kebakaran selama bulan Januari – Desember 2012. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kecamatan Tungkal Ilir Desa Tukul II Rt.01 dan Rt.03 (Parit III) Kelurahan Tungkal II, yang menghancurkan 45 Unit rumah dengan kategori 31 Unit Rumah Rusak Total, 4 Unit Rumah Rusak Berat dan 10 Unit Rumah Rusak Ringan. Sedangkan di Kabupaten Sarolangun Kecamatan Cermin Nan Gedang Desa Lubuk Resam terjadi kebakaran yang menghancurkan 21 unit rumah, dengan kategori 17 Unit Rumah Rusak Total, 2 Unit Rumah Rusak Berat, 2 Unit Rumah Rusak Ringan dan 19 Kios dengan kategori 14 Unit Kios Rusak Total, 5 Unit Kios Rusak Ringan.

Banjir yang terjadi pada bulan Desember 2012 di Kabupaten Muaro Jambi yang mengenang Kecamatan sekernan, Jambi Luar Kota, Maro Sebo, Kumpeh, Kumpeh Ulu, Taman Rajo dan Mestong yang menggenangi 9968 Unit Rumah, 13 Unit Sekolah, 1 Unit Tempat Ibadah, @ Unit Jembatan, 1.000 Ha Sawah, 1700 Ha Kebun, dan 70 Kolam serta menggenangi jalan dengan total sepanjang 14.000 Meter Banjir Bandang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Berbak dan Dendang. Yang merusak 873 unit rumah serta 50 Ha sawah yang mengakibatkan gagal panen. Selain banjir, juga terjadi longsor di Kabupaten Kota Sungai Penuh pada bulan Juni 2012 yang merusak serta menutup Jalan sepanjang 5 meter sehingga mengganggu akses jalur lalu lintas . Akibat perubahan cuaca yang sering terjadi juga mengakibatkan angin putting beliung di Kabupaten Batanghari di Kecamatan Pelayung dan Mersam yang merusak 297 unit rumah, 1 Unit Sekolah serta 2 Unit Sarana Kesehatan.

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi masih ditemui permasalahan sebagai berikut :

- Masih terbatasnya penetapan regulasi penjabaran Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana terutama petunjuk teknis penanggulangan bencana.
- Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana
- Masih terbatasnya sarana pendukung dalam penanggulangan bencana yang ideal
- Belum optimalnya SDM aparatur dalam teknis penanganan tindak lanjut bencana

- Belum seluruh Kabupaten/Kota yang telah membentuk BPBD dan sebahagian masih dikelola oleh Dinas Kesbang Linmas.

Sebagai bentuk mengantisipasi permasalahan telah dilakukan upaya dan solusi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan bimbingan dan latihan tenaga teknis penanggulangan bencana daerah
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kebencanaan
- Peningkatan kapasitas aparatur pengelola data penanggulangan bencana dan logistic pasca bencana
- Memberikan masukan kepada Pemerintah Kab/Kota yang belum membentuk BPBD ataupun SKPD penanggulangan bencana
- Meningkatkan koordinasi baik tingkat Pusat maupun Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana
- Mempersiapkan tenaga teknis dari masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana

6.6 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Gangguan Yang Terjadi

Gangguan yang muncul dalam kaitannya dengan ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2012 di Provinsi Jambi antara lain unjuk rasa/demonstrasi yang berkaitan dengan politik, ekonomi/korupsi, pemogokan kerja, hukum, pertanian/konflik lahan dan sebagainya. Secara lebih jelas dapat terlihat pada table berikut:

Tabel 6.9 Data Unjuk Rasa (Demonstrasi) Provinsi Jambi :
2007 – 2012

No	Uraian	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Politik	45	40	41	10	10	7
2	Ekonomi/Korupsi	5	6	2	50	76	69
3	Pemogokan Kerja	0	0	0	3	3	4
4	Hukum	9	5	6	10	13	20
5	Pertanian/ Konflik Lahan	9	21	4	20	13	21
Total		68	72	53	93	135	121

Sumber : Laporan Kabid Pengendalian Operasional tahun 2012

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

c. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 178 (seratus tujuh puluh

delapan) orang dengan kualifikasi pendidikan SD sebanyak 3 orang, SMP sebanyak 8 orang, SMA sebanyak 129 orang, D3 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 31 orang dan S2 sebanyak 2 orang. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang kepala satuan, dibantu seorang kepala bagian tata usaha, tiga orang kepala bidang, enam orang kasi, dan dua orang kasubbag sebagaimana terlihat pada tabel. 6.G.2 berikut, yaitu :

Tabel. 6.10 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi

No	Gol	Jumlah Pegawai							Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. A	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	3	3
	C	-	-	-	-	-	7	-	7
	D	-	-	-	-	1	1	-	2
	II. A	-	-	-	-	49	-	-	49
	B	-	-	-	-	62	-	-	62
	C	-	-	-	4	-	-	-	4
	D	-	-	-	-	4	-	-	4
	III. A	-	-	16	-	2	-	-	18
	B	-	-	9	-	11	-	-	20
	C	-	-	3	-	1	-	-	4
	D	-	-	3	-	-	-	-	3
	IV. A	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	1	-	-	-	-	-	1
	C	-	1	-	-	-	-	-	1
	D	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juml		2	31	4	129	8	3	178

d. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pada tahun anggaran 2012 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi memperoleh alokasi anggaran APBD Provinsi

Jambi sebesar Rp. 5.010.415.400,00 (Lima milyar sepuluh juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) yang digunakan untuk membiayai enam program yang meliputi 32 kegiatan. Program – program tersebut adalah pelayanan administrasi perkantoran (sebelas kegiatan), peningkatan disiplin aparatur (satu kegiatan), program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (satu kegiatan), program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (satu kegiatan), program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (empat kegiatan), program pemeliharaan kantrantibmas dan tindakan kriminal (enam kegiatan) dan program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

e. Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam penanggulangan masalah gangguan yang terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi melakukan berbagai langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan antisipasi dini serta melakukan pengamanan setiap aksi unjuk rasa/demonstrasi yang terjadi.
2. Memfasilitasi setiap menyampaikan aspirasi pendemo.
3. Terhadap gangguan trantib seperti gelandangan, dan PKL telah dilakukan penertiban-penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Gangguan yang disebabkan Penyakit Masyarakat (PEKAT) telah dilakukan penyuluhan dan razia Pekat berkoordinasi dengan instansi terkait.

f. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

Dalam setiap penanganan aksi unjuk rasa/demonstrasi, dilakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi terutama kepolisian RI. Selain itu, koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian juga dilakukan dalam penyuluhan dan operasi penyakit masyarakat (PEKAT).